



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216,  
Telepon (0293) 491004 Faksimile (0293) 491040  
Laman: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) Pos-el : [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 555/1127 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan untuk informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap Pemohonan Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27- Agustus - 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

**LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI**

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2025 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	1 Tahun
2	Proses Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan Perceraian	Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap data pribadi/PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	1 Tahun
3	Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Informasi Publik			
4	Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
5	Proses pemberhentian PNS	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
6	Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
7	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulansi hasil rapat Baperjakat	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian			
8	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
9	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi	1 Tahun
10	Dokumen Dan Formulir Isian Pegawai	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Data Pribadi			
11	Biodata Elektronik ASN dan Non ASN (Database)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</li> </ul>	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun
12	Data PNS yang akan Di angkat dalam Jabatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Tertinggi</li> <li>2. Administrator</li> <li>3. Pengawas</li> </ol>	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
14	Data Presensi PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
15	Data Pribadi Penderita Kasus AFP (Non Polio), PD3I, KLB , Covid 19	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Data Pribadi tentang penyakit pasien akan menyebar ke publik	Melindungi hak pribadi pasien	1 Tahun
16	Data Pribadi Penderita Kasus Penyakit Menular dan Kasus Penyakit Tidak Menular	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Data Pribadi tentang penyakit pasien akan menyebar ke publik	Melindungi hak pribadi pasien	1 Tahun
17	Biodata Anggota Perpustakaan yang memuat Nama, NIK, Alamat, Nomor Telepon, Alamat elektronik	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2006 tentang Administrasi Kependudukan			
18	Proses penyelidikan & penyidikan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Menghambat proses penegakan hukum M	Kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun
19	Proses Rencana pembinaan dan Pengawasan ketaatan Pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha/kegiatan oleh	Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.			
20	Proses penyelesaian sengketa/aduan/konflik lingkungan hidup (PSLH) yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan hidup	Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang			
21	Dokumen Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dapat disalah gunakan oleh pihakpihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	- Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara  - Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
22	Dokumen Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	Dapat disalah gunakan oleh pihakpihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan	1 Tahun
23	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Kearsipan			
24	Data Data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/ Negar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas</li> </ul>	Membahayakan Pemerintahan/ Negara	Melindungi Data Pemerintah/ Negara	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Intelejen Daerah			
25	Data Keberadaan Orang Asing di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah</li> </ul>	Berpotensi Menimbulkan tindakan Kriminal yang dapat mengancam keberadaannya	Keberadaan Orang asing menjadi terlindungi	1 Tahun
26	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>- Peraturan</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis			
27	Data Hutang Pasien Kepada RS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	1 Tahun
28	Data Pribadi terkait NIK dan biometrik	Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah	Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah	1 Tahun
29	Dokumen Akta Pencatatan Sipil	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013	Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah	Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah	2 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
30	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan, aset dan design produksi	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Dapat mengungkap dokumen rahasia perusahaan/perorangan	Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	1 Tahun
31	Data permohonan izin yang belum selesai diproses	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan mengganggu proses perizinan	Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Informasi Publik			
32	Data pribadi anggota DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), pasal 85 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
33	Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD yang dinyatakan tertutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun</li> </ul>	Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menyebabkan situasi yang kondusif	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		<p>2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p>			
34	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
35	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung	Pasal 40 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
36	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
37	Buku Assesment infrastruktur jaringan internet	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
38	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
39	Data aplikasi sebagai berikut: a. OS Server yg digunakan b. Database c. User dan password d. Manual pengembangan web e. Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan f. Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengaman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Transaksi Elektronik			
40	Data Gaji, Rekening Tabungan, Pinjaman Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang	Informasi yang bersifat pribadi dapat terlindungi, menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	1 Tahun
41	Data wajib pajak Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi seseorang	Menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	1 Tahun
42	Database Obyek Pajak dan Retribusi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi/meng amankan database objek pajak dan retribusi	1 Tahun
43	Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban, serta anak berhadapan dengan hukum	- Pasal 17 huruf a angka 2 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	Perlindungan Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;</li> <li>- Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;</li> <li>- Pasal 10 huruf c</li> </ul>			

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;</p> <p>- Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</p> <p>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>			

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
44	Data pribadi tenaga kerja asing	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	1 Tahun
45	Data pribadi Pekerja / Buruh	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Mengungkap data pribadi pekerja / buruh yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pekerja/ buruh yang bersifat rahasia	1 Tahun
46	Data pribadi perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan, neraca dan aset	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	1 Tahun

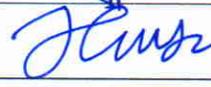
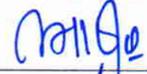
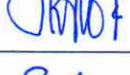
NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang			

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
PLA SEKRETARIS DAERAH,



GUNTO SUSILO

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Indah Retno Sari	Andlis bukum	Sekretariat Daerah	
2	ARI SAPUTRA	Pranata Komputer	Inspektorat	
3	Sanento B.S.	Seuwa	Dinkes	
4	Jatnika Sutarni	Pengad. Perkan	Dinperinascer	
5	M. Erwin P	Asiparts	Dinpusip	
6	RURI RAHMAD KANAJATI SYAFI'I	Pranata Komputer Terampil	DPUPR	
7	Ika Widya Prastika	Pranata Komputer Terampil	Dinpermades	
8	Kartika HD.	Analisis Kebijakan ahli pangan	DPPAPPPRS	
9	SUMARNIZATI	Pengadmi. umum.	kerbaropol	
10	Komra.P	Kasubag Umpeg	BKPSDM	
11	Ogi	prakom	---	
12	Edi Prasetyo	Staf Administrasi	Setwan	
13	Ali Mar-hadi	Prakom	DPUPREP	
14	Rahma Anitta z.	Pengolah Data & Informasi	BKPAO	
15	Siti Erna Susanti	Umpeg	Dindukcapil	
16	Hardyo	Kominfo	Kominfo	
17	Aiman NA	Prakom	Kominfo	
18	HASAN D	KABID TIK	---	
19	Andina Diah R	Kabid IKP	---	
20	BAGAS BUOTAWAN	MAHASISWA	UNTIDAR	
21	Dobby Salgu Fikry	Mahasiswa	UNTIDAR	
22	Dea Asmara	Mahasiswa	UNTIDAR	
23	M. Reza - Firdaus	Mahasiswa	UNTIDAR	
24	Eko Kus Prasetyo	Prakom Ahli	Dinkominfo	

25	Ning Falasifa Ootunnada	Mahasiswa	UNTIDAR	<i>falispa</i>
26	NOVITA NUR AISYAH	Staf IKP	Dinkominfo	<i>Novita</i>
27	ACHMAD RUSTAM AFANDI	STAF IKP	DINKOMINFO	<i>Afandi</i>
28	/			
29				
30				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

